

Lampiran 1 : Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul/Tema	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian, Relevansi dan perbedaan dengan penelitian ini.
Joko Widodo (2006)	Akuntabilitas Birokrasi Publik Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Evaluasi dampak (policy outcomes and impact evaluation research) pelaksanaan kebijakan AKIP dalam wujud LAKIP instansi Pemkab Sidoarjo	Diskriptif Kualitatif	Hasil dan dampak pelaksanaan AKIP dalam wujud LAKIP belum dapat dinikmati masyarakat karena kebijakan AKIP dalam wujud LAKIP menekankan akuntabilitas manajerial. Selain itu kebijakan dalam wujud LAKIP belum mengatur sanksi yang tegas. Relevansi dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang evaluasi kebijakan dan adanya rekomendasi bagi pembuat kebijakan . Perbedaannya pada obyek yang diteliti yakni pada Widodo seluruh kegiatan diteliti sedangkan pada peneliti hanya satu kegiatan yakni operasi kepolisian pengamanan Lebaran .
Sirpan (2000)	Analisis Kinerja Dinas Pendidikan Dalam Pelayanan Pendidikan Di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan	Kinerja yang berkaitan dengan produktivitas , efektivitas , efisiensi dan Kualitas program.	Diskriptif kualitatif	Kinerja Dinas Pendidikan tercapai melalui :Produktivitas output sebesar 98,44%, Effektivitas sebesar 100%, Effisiensi sulit diukur, dan kualitas Program diukur melalui kualitas kepuasan masyarakat yang menyatakan puas. Relevansinya dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang kebijakan . Perbedaannya adalah penelitian Sirpan memfokuskan hanya menganalisa dari Lakip saja dan kurang adanya

Peneliti	Judul/Tema	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian, Relevansi dan perbedaan dengan penelitian ini.
Purwanto dkk (2014)	Implementasi Pemungutan Pajak Alat Berat / Besar Pada Dinas Pendapatan Daerah Samarinda , Propinsi Kalimantan Timur	Mekanisme implementasi pajak dan faktor faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.	Penelitian kualitatif.	<p>kontrol melalui metode evaluasi yang lain, Lakip hanya menunjukkan kinerja manajerial saja sedangkan penulis selain berdasarkan Lakip juga evaluasi yang digunakan mengukur kinerjanya melalui evaluasi produk baik melalui CIPP, Indeks kepuasan masyarakat maupun metode framing.</p> <p>Hasil penelitian : Dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat kendala disebabkan belum adanya kejelasan standard an tujuan kebijakan . Belum tercipta sumberdaya yang diperlukan . Komunikasi yang tidak jelas dalam organisasi. Kurangnya komitmen pelaksana. Selain itu disebabkan adanya hambatan kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak , kurang koordinasi dengan instansi terkait dan lemahnya penegakkan hukum.</p> <p>Relevansinya dengan penelitian ini adalah peneliti bisa mendapatkan masukan dalam pembuatan kebijakan terutama dalam tahap implementasinya. Perbedaanannya adalah yang dievaluasi hanya Implementasi kebijakan sedangkan penulis adalah seluruh proses kebijakan.</p>

Peneliti	Judul/Tema	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian, Relevansi dan perbedaan dengan penelitian ini.
Levine (1990)	Public Administration : Challenges, Choises, Consequences.	Pengembangan model kinerja pada Korporasi Publik (Kereta Api).		Tantangan pelayanan untuk masyarakat diukur melalui kinerja organisasi publik. Organisasi privat kinerjanya bisa mencapai produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Sedangkan organisasi publik kinerjanya hanya pada responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Relevansinya adalah sama sama meneliti tentang model yang cocok untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Perbedaannya adalah pada organisasi yang diteliti yakni kalau penelitian penulis kepada organisasi non profit tetapi Levine meneliti organisasi berorientasi profit.
Abdul Razak (2002)	Evaluasi Kinerja Kebijakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Tentang Pelaksanaan Program Kali Bersih	Kinerja dan komitmen terhadap pelaksanaan aturan standar kerja	Kuantitatif. Analisis sistem dinamis	Program kali bersih kinerjanya bisa mencapai sasaran apabila pelaksana mempunyai komitmen terhadap aturan standar kerja . Relevansinya adalah sama sama meneliti evaluasi terhadap suatu kebijakan . Perbedaannya evaluasinya hanya pada kinerja kebijakan sedangkan peneliti seluruh proses kebijakan.
Azhari Asis (2008)	Evaluasi Kebijakan Fiskal Pada Dinas Pendapatan Daerah	Pengukuran kinerja kebijakan menggunakan sistem Lakip	Kuantitatif System Thinking dan System	Tidak ditemukan gambaran yang jelas dan rinci tentang faktor faktor yang menjadi penyebab kinerja kebijakan yang diambil berjalan dengan

Peneliti	Judul/Tema	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian, Relevansi dan perbedaan dengan penelitian ini.
	Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.		Dinamics	benar yang disebabkan oleh tidak mampunya merumuskan kebijakan fiskal. Perlu memasukkan perencanaan strategik dan sumberdaya manusia sebagai pendukung dimensi finansial yang mempunyai pengaruh dominan pada kinerja kebijakan. Relevansinya dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti kebijakan . Perbedaannya Azhari hanya membedah melalui Lakip pada seluruh penelitiannya saja tetapi peneliti membedahnya juga menggunakan dokumen perjanjian kinerja.
Rahmad Salam (2003)	Evaluasi kinerja birokrasi dalam penanganan transportasi di Kota Bogor	Kebijakan di bidang transportasi	Kuantitatif. Sistem Thinking dan Sistem dinamik	Rendahnya koordinasi dibidang transportasi antara Pemkot Bogor dan Pemkab Bogor mengakibatkan permasalahan transportasi di kota Bogor. Relevansinya sama sama mengevaluasi kinerja suatu kebijakan transportasi. Perbedaannya terletak pada cakupan kebijakan di kota Bogor sedangkan peneliti pada pulau Jawa.
Endang (2004)	Kebijakan Layanan Pendidikan di Kota Bandung	Evaluasi kebijakan pelayanan pendidikan di kota Bandung	Kualitatif	Kebijakan layanan publik di kota Bandung merupakan yang terbaik di Jabar tetapi penilaian tersebut tidak melibatkan pemberi dan penerima layanan sehingga lebih cenderung laporan dari

Peneliti	Judul/Tema	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian, Relevansi dan perbedaan dengan penelitian ini.
John Mooney (2009)	A Case Study of Performance appraisal in Small Public Sector Organization	Kinerja organisasi sektor publik	Case Study	<p>atasan ke bawahan. Relevansinya sama sama mengevaluasi penerapan kebijakan. Perbedaannya tidak melibatkan pendapat masyarakat untuk menilai keberhasilan kebijakan Sedangkan pe- neliti melibatkan pendapat masyarakat.</p> <p>Untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu dibuat sistem baru yang lebih komprehensif yang mengembangkan pelatihan dengan memadukan pengalaman staf. Relevansinya dengan penelitian ini adalah sama sama ingin mengetahui kinerja sektor publik. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitiannya dimana Mooney pada masyarakat yang sudah maju sedangkan penelitian ini pada masyarakat di negara berkembang.</p>

Sumber : Diolah oleh penulis.

Lampiran 2 : Daftar Nama Informan Penelitian Evaluasi Kebijakan Operasi Pengamanan Kepolisian Lebaran 2016

NO	NAMA	JABATAN	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
1.	Kombes Pol. Drs.Basuki MM	Kabag Jakum Rojakstra Srena Polri	Bagaimana pendapat Bapak tentang pembuatan indikator kinerja dan penerapannya didalam operasi kepolisian?	Membicarakan kinerja tentu terkait tentang hasil dari suatu pekerjaan yang dijalankan. Operasi kepolisian pengamanan Lebaran kerjanya diukur dari Target Operasi (TO) yang dicapai , berhasil atau tidak. Suatu Target Operasi (TO) harusnya ada ukuran yang bisa dicapai dan mudah diukur keberhasilannya dengan membandingkan ukuran(target) yang telah direncanakan. Target Operasi jangan banyak banyak. Indikator kinerja merupakan standar minimal yang harus dicapai. Indikator kinerja sangat penting .	Hal 148
2.	AKBP Drs Supriyadi	Kasubbag Renopswil Bag renops Robinops Sops Polri	Bagaimana pendapat Bapak tentang kinerja pelaksanaan operasi kepolisian pengamanan Lebaran?	Mengenai kinerja operasi kepolisian pengamanan Lebaran 2016 kalau saya nilai operasi ini masih ada kelemahannya terutama dari segi pengawasan dan pengendalian di lapangan . Hal ini disebabkan antara lain karena hubungan tata cara kerja (HTCK) tidak jelas. Personel yang ditempatkan pada suatu area harus diawasi bagaimana bekerja. Selama ini banyak yang bukan dari lalu lintas sehingga canggung dalam melaksanakan tugas . Latpraops di pusat harus diadakan meskipun selalu terkendala ketersediaan anggaran . Sebagai satu sistem dalam struktur organisasi operasi kepolisian ,ketergantungan dan keterkaitan antar bagian didalam organisasi sangat menentukan keberhasilan operasi, untuk itu perlu hubungan tata cara kerja (HTCK) yang jelas .	Hal.207

NO	NAMA	JABATAN	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
3.	AKBP Sumartopo	Kasubbag Anev Renopswil Bag Anev Robinops Sops Polri	Apakah analisa dan evaluasi operasi kepolisian pengamanan Lebaran tahun 2015 digunakan sebagai masukan dalam operasi kepolisian pengamanan Lebaran tahun 2016.	Perlu latihan sebelum operasi sehingga kerjasama antar petugas di lapangan bisa tercipta. Kerjasama akan terjadi bila ada Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) antara personil yang satu dengan yang lain dalam satuan tugas (Satgas) tersebut”.	Hal.136
4.	Heru Prasetyo, S.Kom.	Pamin Subbagren Bagrenmin Sops Polri.	Apakah anggaran operasi kepolisian telah dimasukkan dalam Dipa tahun 2016? Bagaimana menurut Bapak dinamika penganggarannya?	Anggaran operasi kepolisian pengamanan Lebaran telah masuk dalam Dipa 2016 selain juga terdapat dalam anggaran kontijensi karena apabila tidak dianggarkan dalam dokumen perencanaan maka operasi kepolisian tidak bisa dilaksanakan.	Hal. 109
5.	Ronal A. Anas	Deputi Pengawasan dan Angkutabilitas , Kementerian Pan dan RB	Bagaimana menurut Bapak cara mengukur keberhasilan operasi kepolisian pengamanan Lebaran ?	Seperti sering saya jelaskan bahwa semua kegiatan apabila akan di evaluasi harus ada ukuran kinerjanya, apalagi ini merupakan suatu operasi kepolisian. Minimal ukuran kinerja outcomes bukan output lagi karena harus bermanfaat bagi masyarakat. Cara mengukurnya adalah membandingkan antara target yang telah direncanakan sebelumnya dengan hasil kinerja yang dicapai. Bisa juga dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau melakukan penelitian pada masyarakat .	Hal. 200

NO	NAMA	JABATAN	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
6.	AKBP Drs Hartono	Kasubbag Dastik Bagpullahjianta Rodalops Sops Polri	Bapak sebagai anggota Rendalops Satgaspus operasi kepolisian pengamanan Lebaran tahun 2016 , apakah kendala yang dihadapi selama melaksanakan tugas sebagai anggota Rendalops operasi tersebut?	Dalam operasi kepolisian pengamanan Lebaran ini adalah perlunya kecepatan dalam mengatasi kendala ,baik kemacetan, kecelakaan dan lain lain melalui arahan yang diberikan kepada kewilayahan sesuai data yang diterima dari kewilayahan. Perlu adanya dukungan melalui pemanfaatan teknologi yang terkoneksi antar Posko agar cepat penanganan permasalahan di lapangan .	Hal. 209
7.	Kombes Pol Drs Suwardi	Kabagbinlat Robinops Sops Polri	<p>1. Apakah peran Supervisi dalam operasi kepolisian pengamanan Lebaran?</p> <p>2. Bagaimana peranan Latihan pra operasi dalam operasi kepolisian ?</p>	<p>1. Supervisi operasi dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui apakah operasi kepolisian pengamanan Lebaran sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana operasi yang telah ditentukan atau belum, apakah ada hal hal yang perlu dikoreksi dalam pelaksanaan supervisi misalkan cara bertindak yang perlu segera diterapkan karena adanya perubahan dinamika di lapangan karena kemacetan yang luar biasa dan sebagainya. Supervisi Operasi pengamanan Lebaran dilaksanakan dalam rangka pembinaan fungsi Sops selaku pelaksana manajemen operasi kepolisian .</p> <p>2. Peran latihan sebelum operasi kepolisian sangat penting dan itu harus dilakukan untuk setiap jenis operasi. Operasi kepolisian pengamanan Lebaran tidak tersedia anggaran operasi padahal personil</p>	<p>Hal 162</p> <p>Hal. 116</p>

NO	NAMA	JABATAN	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
8.	AKBP Sridadi Budi Sulistyati B.Sc	Kasubbag Lakgar tertentu Baglakgarev Rojemengar Srena Polri	Mengapa anggaran Operasi kepolisian tidak diambilkan dari anggaran DIPA saja tetapi juga diambilkan dari anggaran kontijensi.?	<p>operasi pengamanan Lebaran bukan berasal dari fungsi lalulintas saja bahkan juga berasal dari instansi di luar Polri. Kelancaran dan keberhasilan operasi sangat dipengaruhi juga latihan pra operasi guna penyamaan persepsi , penanganan permasalahan yang akan dihadapi, untuk itu perlu anggaran.</p> <p>Anggaran operasi kepolisian pengamanan Lebaran tiap tahunnya selalu diambilkan dari anggaran Dipa maupun dari anggaran kontijensi</p> <p>karena kalau dari Dipa saja tidak cukup . Operasi pengamanan Lebaran dianggap sangat penting sehingga perlu dianggarkan.</p>	Hal. 115
9.	AKBP Drs. Johny Iskandar S.Ik	Kasubbagenops pus Bagrenops Robinops Sops Polri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana operasi pengamanan Lebaran tahun 2016 direncanakan? 2. Berdasarkan struktur organisasi operasi terlihat hanya sampai Mabes Polri (tingkat Pusat) bagaimana menurut anda pengaruhnya terhadap pelaksanaan operasi?, 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Operasi yang direncanakan berdasarkan pada perkiraan intelijen, selain itu kita juga melihat pada hasil anev operasi yang sama tahun lalu. Kita undang seluruh fungsi di Polri untuk memetakan permasalahan yang akan terjadi dan cara pemecahannya. Dibuat pula Target operasi yang menjadi keharusan untuk dicapai berdasarkan anev dan harapan masyarakat. 	Hal 146

NO	NAMA	JABATAN	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
10.	AKBP Endang Sik	Kasubbaglatpra ops Bagbinlatops Robinops Sops Polri	Apakah peran Latpraops didalam operasi dan mengapa dalam operasi pengamanan Lebaran tahun 2016 tidak ada Latpraops?	<p>1. Latpraops sangat penting sebagai bekal awal personil yang akan bertugas dalam mempersiapkan diri menjalankan operasi. Latpra Ops harus dijalankan karena mereka mendapat pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawabnya selama operasi. Mereka harus dilatihkan sesuai dengan kondisi di lapangan yang mungkin terjadi. Tanpa bekal awal berupa informasi operasi mereka akan meraba raba dalam tugasnya. Dana untuk Latpraops tidak tersedia . Selain Latpraops , HTCK juga harus jelas agar mereka tahu tanggungjawabnya di lapangan.</p> <p>2. Selain dibutuhkan rencana pengamanan yang jelas juga diperlukan pelatihan yang jelas dalam arti latihan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang akan dihadapi dengan pula struktur organisasi harus jelas sampai tingkat Polres sehingga mereka tahu akan berbuat apa?</p>	Hal. 216 Hal. 134
11.	Dr. Gaumsyah	Konsultan Independen untuk Reformasi Birokrasi Polri	Bagaimana Bapak menilai tentang operasi kepolisian pengamanan Lebaran tahun 2016?	<p>Hasil penelitian independen baik yang berkaitan dengan persepsi masyarakat maupun media massa memang bisa mengembalikan harapan masyarakat kepada Polri. Penelitian di 16 kota di Jawa tentang operasi kepolisian pengamanan Lebaran seperti yang disebutkan hasilnya kalau saya diminta pendapat merupakan nilai yang bagus. Perlu juga dilihat atau diperluas penelitiannya tentang kepuasan yang lain berkaitan dengan kebijakan operasi pengamanan Lebaran.</p>	Hal.200

NO	NAMA	JABATAN	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
12.	Kombes Pol Drs Syamsul Bachri	Kabag Progar Rojianstra Sops Polri	1. Bagaimana pendapat Bapak tentang ketersediaan anggaran untuk operasi pengamanan Lebaran?	1. Kalau anggaran untuk operasinya tersedia, baik yang ada di DIPA maupun anggaran kontijensi. Memang selama ini terdapat keluhan tidak tersedianya anggaran untuk Latpraops. Anggaran telah disiapkan setahun sebelumnya bahkan didalam Renstra sudah ada gambaran yang berupa perkiraan anggaran operasi kepolisian tiap tahunnya.	Hal. 117
13.	Kombes Pol Drs Agus Riansyah	Kabagpullahjianta Rodalops Sops Polri	Bagaimana caranya menurunkan tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas saat Lebaran ?	Kecelakaan lalu lintas saat mudik dan balik Lebaran dirasakan masih tinggi dan itu harus diturunkan bila mungkin dihilangkan. Cara cara yang bisa dilakukan adalah melalui edukasi terus menerus melalui ajakan, himbauan, pengawasan pembuatan SIM yang benar teruji, sehingga meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dimulai dari adanya pelanggaran lalu lintas.	Hal.173
14.	Kombes Pol Dadang Muharam	Irbidjemen Opsnal II Itwil IV Itwasum Polri	1. Bapak pernah melaksanakan pengawasan operasi kepolisian ,bagaimana menurut Bapak pelaksanaan ops. Kepolisian pengamanan Lebaran tahun 2016?	1. Kemacetan yang luar biasa di Pintu Tol Brebes Timur dan daerah sekitarnya ,itu sebetulnya karena kesalahan petugas. Saat saya melakukan Wasops petugas kurang koordinasi dan tidak disiapkan untuk menghadapi kondisi seperti itu. Harusnya dilatih cara menangani dan juga koordinasi yang cepat dan jelas sehingga dapat dengan cepat menangani permasalahan tersebut.	Hal. 163

NO	NAMA	JABATAN	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
15.	Dr. Rusmadi Suyuti	Kabid Sistem Transportasi BPPT	<p>2. Apakah faktor kerjasama atau sinergitas antar petugas di lapangan tidak jalan ?</p> <p>Bagaimana menurut Bapak penangan kemacetan saat Lebaran ?</p>	<p>2. Contoh nyata terjadinya kemacetan lalulintas luar biasa di Pintu tol Brebes dan jalan jalan sekitarnya selain karena jalanan yang sudah tidak bisa menampung kendaraan juga petugas tidak mengerti tugas dan tanggung jawabnya , koordinasi tidak jalan lancar dan mereka dilatihkan apabila menghadapi kondisi medan yang mendadak dan macet luar biasa,</p> <p>Pada saat Lebaran kondisi jalan dapat dipastikan akan macet karena kapasitas jalan tidak mampu menampung kendaraan dalam jumlah sangat banyak dalam waktu hampir bersamaan . Kondisi kemacetan ini perlu diurai pada jalan jalan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pembangunan jalan dibuat seperti suatu sistem dengan fungsi masing masing yang intinya untuk memperlancar dan mempermudah arus lalu lintas. Pada saat Lebaran sistem transportasi lalu lintas ini bisa dimanfaatkan , kapan harus melalui jalan tol, jalan propinsi , dan jalan jalan alternative yang lain. Hal ini perlu diorganisir sedemikian rupa sehingga dapat memperlancar arus lalu lintas. Kemacetan disuatu tempat bisa menyebabkan kemacetan yang lebih parah di tempat yang lain apabila pengalihan arus lalu lintas tidak disertai informasi kondisi lalu lintas di tempat lain. Kerjasama antar petugas di lapangan yang ditugasi pada jalan jalan tersebut kurang berkomunikasi. Perencanaan sejak awal diperlukan .</p>	<p>Hal. 134</p> <p>Hal. 134</p>

NO	NAMA	JABATAN	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
16	Kombes Pol Bambang Nugroho SE.	Irbidjemen Garku Itwil III Itwasum Polri	Apa perbedaan Pengawasan operasi kepolisian dan Supervisi operasi kepolisian dan apa manfaatnya?	Bahwa pengawasan operasi (Wasops) adalah sesuatu hal yang berbeda , wasops adalah pengawasan apakah operasi telah berjalan sesuai arahan pembina fungsi yakni Asops Kapolri selaku pelaksana manajemen operasi kepolisian , apakah penggunaan anggaran sesuai ketentuan, arahan arahan apa yang telah dilakukan oleh Sops Polri.Pengawasandilaksanakan oleh Itwasum Polri. Disisi lain Supervisi yang dilaksanakan Sops Polri bertujuan untuk memperlancar untuk memperlancar pelaksanaan operasi sesuai dengan ketentuan dalam Renops. Memperhatikan waktu operasi yang singkat maka hasil temuan dan koreksi selama operasi agar cepat ditindak lanjuti karena dinamika penanganannya memang membutuhkan kecepatan dan ketanggap segeraan	Hal. 162

Lampiran 3 : Daftar Hasil FGD Operasi Kepolisian Pengamanan Lebaran 2016

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	SESUAI DENGAN KEGIATAN KITA YAKNI MELAKUKAN KEGIATAN PEMBUATAN LKIP SOPS POLRI TA. 2016 DIMANA DIDALAMNYA TERDAPAT KEGIATAN OPERASI KEPOLISIAN PENGAMANAN LEBARAN, KEMACETAN MASIH TERJADI SELAMA INI, MENURUT SAUDARA APA PENYEBABNYA ?	Jumlah kendaraan yang banyak dibanding kemampuan daya tampung jalan. <ul style="list-style-type: none"> - kurang sadar berlalu lintas - kondisi jalan menyempit - persimpangan - pasar tumpah - HTCK tidak ada (tidak sampai wilayah)
2.	APAKAH MENURUT SAUDARA TARGET OPERASI (TO) PENGAMANAN LEBARAN PERLU DIPERBAIKI ?	<ul style="list-style-type: none"> - Target Operasi perlu diperbaiki dan dipertajam - TO penurunan kecelakaan - Kemacetan berkurang
3.	APAKAH TO TERSEBUT KURANG TAJAM ?	<ul style="list-style-type: none"> - TO kurang tajam - TO harus terukur - TO harus fokus
4.	BAGAIMANA KINERJA OPERASI KEPOLISIAN TERSEBUT APABILA DIKAITKAN DENGAN CARA PENGUKURAN KINERJA YANG DITENTUKAN PEMERINTAH ?	<ul style="list-style-type: none"> - Belum sesuai pengukuran kinerja yang ditetapkan pemerintah. - Belum Komprehensif.
5.	APAKAH MENURUT SAUDARA MASYARAKAT TELAH PUAS DENGAN KINERJA POLRI ?	Masih belum puas, diperlukan penelitian untuk mengukur kepuasan masyarakat.
6.	APAKAH MENURUT ANDA STRUKTUR ORGANISASI YANG DIBUAT SOPS POLRI UNTUK PELAKSANAAN OPERASI KEPOLISIAN PENGAMANAN LEBARAN TAHUN 2016 TELAH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN OPERASI TERSEBUT ?	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi belum sesuai tidak didukung HTCK sampai wilayah. - perlu diperbanyak anggota posko yang langsung memberikan pelayanan
7.	APAKAH MASUKAN DARI ITWASUM POLRI AGAR DIBUAT HTCK OPERASI KEPOLISIAN MASIH DIPERLUKAN	HTCK Operasi Kepolisian masih diperlukan.
8.	APAKAH PERSONEL YANG MENGIKUTI OPERASI RAMADNIYA-2016 TELAH MENGETAHUI TUGAS DAN FUNGSINYA.	Belum semuanya mengerti apalagi tidak ada HTCK
9.	BAGAIMANA PENDAPAT SAUDARA TENTANG PEMETAAN RAWAN	Pemetaan kerawanan diperlukan dan diberikan cara bertindak,

NO	URAIAN	KETERANGAN
	KEMACETAN UNTUK OPERASI PENGAMANAN LEBARAN ?	diperlukan pemetaan rawan kriminalitas, rawan bencana.
10.	APAKAH DIPERLUKAN LATIHAN PRA OPERASI (LATPRAOPS) ?	<ul style="list-style-type: none"> - Sangat perlu dan Latpraops diarahkan pada hasil yang direncanakan.(TO) - Diperlukan Latpraops metodenya perlu dievaluasi - Diperlukan untuk bekal personel menjalankan tugas, langkah langkah dan CB yang harus dilakukan.
11.	PERMASALAHAN APA YANG JADI KENDALA DALAM LATPRAOPS ?	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Latpraops sehingga anggota sulit bekerjasama di lapangan.
12	MASUKAN MASUKAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN OPERASI KEPOLISIAN PENGAMANAN LEBARAN TAHUN 2017 ?	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu ada anggaran Latpraops - Persiapkan fisik dan mental Personel. - Arahkan dengan jelas, perlu HTCK sampai kewilayahan. - TO dipertajam kembali - Pelibatan personel sesuai kebutuhan wilayah - Perlu langkah langkah antisipasi dan cara bertindak yang jelas - Terus berkoordinasi dengan instansi terkait - Survei sebelum operasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemacetan dan kecelakaan - Perlu rapat koordinasi sebelum operasi guna menukar informasi dan langkah langkah yang akan diambil - Ditambah CCTV di titik titik kemacetan - Bila diperlukan digunakan pengaturan kendaraan bergantian ganjil genap saat operasi - Perlu Latpraops dengan melibatkan seluruh Satker yang dilibatkan

Sumber : Data Primer Diolah Penulis

**Lampiran 4 : Hasil Pengecekan Dokumen Persiapan Operasi Kepolisian
Pengamanan Lebaran 2016**

NO	KEGIATAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pembuatan direktif Kapolri	√		
2.	Pembuatan perkiraan khusus Intelijen	√		
3.	Rapat Koordinasi dengan fungsi terkait	√		
4.	Penyusunan rencana Teknologi Informasi	√		
5.	Pembuatan Rencana Operasi	√		
6.	Penyusunan Rencana Latihan dan penyelenggaraan latpraops		√	
7.	Penyusunan dan pengiriman Perintah Operasi	√		
8.	Penyiapan format dan blangko dokumen Operasi	√		
9.	Penyusunan Hubungan dan tata cara kerja Operasi (HTCK)		√	Struktur Organisasi ada tetapi HTCK tidak sampai di Kewilayahan
10.	Penyiapan tanda pengenal	√		
11.	Penyaluran Anggaran	√		Anggaran Latpraops tidak ada,
12.	Pengecekan akhir pembagian dukungan sarana prasarana operasi	√		
13.	Penyiapan Posko Operasi	√		

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Lampiran 5 : Contoh rekomendasi pengukuran Kinerja Operasi Kepolisian Pengamanan Lebaran

